

## PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SETDA PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025

Desi Putri Dama<sup>1</sup>, Ghoriqna Fibahril Wahdah<sup>2</sup>, Syamsinah<sup>3</sup>, Nur Rizky Putri Mahadi<sup>4</sup>,  
Rahmat Nasila<sup>5</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Mandiri Gorontalo

<sup>4,5)</sup> Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Mandiri Gorontalo  
e-mail: desiputridama25@gmail.com

### Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada pendampingan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025 di Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo telah memberikan dampak positif terhadap penguatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui program ini, tim pengabdian melakukan pelatihan dan bimbingan langsung kepada staf Sekretariat Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip penganggaran yang efektif dan transparan. Dampak yang dihasilkan mencakup peningkatan kemampuan dalam merumuskan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Selain itu, kegiatan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, sehingga menciptakan rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap program-program pemerintah. Penerapan indikator kinerja dalam RKA 2025 juga memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang lebih baik, sehingga hasil dari anggaran dapat diukur dan dievaluasi secara tepat. Dengan demikian, pendampingan ini tidak hanya berkontribusi pada efektivitas pengelolaan anggaran, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah di Gorontalo.

**Kata kunci:** Rencana Kerja Anggaran, Efektif, Transparan

### Abstract

The community service activities centered on assisting in the preparation of the 2025 Budget Work Plan (RKA) at the Provincial Government Secretariat of Gorontalo have yielded positive impacts on strengthening the capacity for regional financial management. Through this program, the service team conducted training and direct guidance for the Secretariat staff, aimed at enhancing their understanding of effective and transparent budgeting principles. The resulting impacts include an improved ability to formulate budgets that are responsive to community needs and strengthened accountability in public fund management. Furthermore, this initiative encourages community participation in the planning process, thereby fostering a greater sense of ownership over government programs. The implementation of performance indicators within the 2025 RKA also facilitates better monitoring and evaluation, allowing for the precise measurement and assessment of budget outcomes. Thus, this assistance not only contributes to the effectiveness of budget management but also enhances the quality of public services and the trust of the community in the regional government of Gorontalo.

**Keywords:** Budget Work Plan, Effective, Transparent.

### PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan daerah yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pembangunan. Dalam konteks ini, RKA tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa alokasi anggaran mencerminkan kebutuhan masyarakat. Namun, di Indonesia, banyak daerah yang masih menghadapi tantangan dalam menyusun RKA yang efektif. Tantangan tersebut sering kali berkaitan dengan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan, yang membuat publik kesulitan untuk memahami bagaimana anggaran digunakan. Keterlibatan masyarakat juga sering diabaikan, sehingga keputusan yang diambil tidak mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil warga. Hal ini, pada gilirannya, mengakibatkan potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran, yang tidak hanya menghambat kemajuan, tetapi juga menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Selain itu, fenomena penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran sering kali berakar dari minimnya partisipasi publik dalam proses perencanaan. Banyak masyarakat yang tidak diberi

kesempatan untuk memberikan masukan atau kritik terhadap RKA yang disusun, sehingga alokasi dana bisa saja menguntungkan segelintir pihak atau proyek yang tidak prioritas. Kurangnya pemahaman akan pentingnya RKA yang baik dan keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut juga memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun RKA yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi sangat penting. Melalui pendekatan yang lebih inklusif, diharapkan RKA dapat berfungsi secara optimal, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, upaya pengabdian masyarakat dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKA yang baik sangatlah relevan dan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan lebih adil.

Pengelolaan anggaran yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi Masyarakat (Sihombing, 2021). Hal ini sejalan dengan (Undang-Undang No. 17 Tentang Keuangan Negara, 2023), yang menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses penganggaran. Pendapat (Kurniawan, 2020) juga menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan daerah yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pembangunan. Dalam konteks ini, RKA tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa alokasi anggaran mencerminkan kebutuhan masyarakat. Namun, di Indonesia, banyak daerah yang masih menghadapi tantangan dalam menyusun RKA yang efektif. Tantangan tersebut sering kali berkaitan dengan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan, yang membuat publik kesulitan untuk memahami bagaimana anggaran digunakan. Keterlibatan masyarakat juga sering diabaikan, sehingga keputusan yang diambil tidak mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil warga. Hal ini, pada gilirannya, mengakibatkan potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran, yang tidak hanya menghambat kemajuan, tetapi juga menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Ketika masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran, mereka merasa memiliki andil dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini menciptakan rasa kepemilikan terhadap program-program pembangunan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan anggaran yang baik. Dengan demikian, pendekatan yang lebih inklusif dalam penyusunan RKA dapat menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kolaborasi yang erat, diharapkan RKA dapat berfungsi secara optimal, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya pengabdian masyarakat dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKA yang partisipatif menjadi sangat relevan dan merupakan langkah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan lebih adil.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pentingnya penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang partisipatif, masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya di lapangan. Banyak daerah, termasuk Provinsi Gorontalo, belum sepenuhnya menerapkan pendekatan ini, sehingga kualitas RKA yang dihasilkan kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip partisipatif di kalangan penyusun anggaran, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Menurut (Mardiasmo, 2020), partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi tanpa adanya pelatihan dan dukungan yang tepat, implementasi prinsip-prinsip tersebut akan tetap sulit diwujudkan. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ini dengan memberikan pendampingan langsung dalam proses penyusunan RKA 2025. Melalui program ini, diharapkan para pemangku kepentingan dapat memahami pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahap penyusunan anggaran.

Pendapat lain dari (Taufiq, 2021), menegaskan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar formalitas, tetapi harus diintegrasikan ke dalam setiap aspek perencanaan dan penganggaran. Ia berargumen bahwa keterlibatan masyarakat dapat menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan yang dihasilkan, sehingga meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program-program

pembangunan. Dengan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada aparat pemerintah dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas dalam penyusunan RKA yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Implementasi pendekatan partisipatif dalam penyusunan RKA akan mendorong terciptanya anggaran yang lebih baik, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik di Provinsi Gorontalo.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Sekretariat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan memberikan pelatihan dan pendampingan, para pegawai diharapkan dapat memahami secara mendalam teknik dan prinsip penyusunan anggaran yang efektif. Ini meliputi pemahaman tentang analisis kebutuhan masyarakat, identifikasi prioritas pembangunan, serta bagaimana mengintegrasikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas ini penting agar RKA yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga relevan dengan kondisi dan harapan masyarakat setempat.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan anggaran, sehingga menghasilkan RKA yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan melibatkan masyarakat, tidak hanya suara mereka yang didengar, tetapi juga rasa memiliki terhadap program-program yang diusulkan akan semakin kuat. Proses yang inklusif ini diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan demikian, melalui kegiatan ini, diharapkan akan ada kontribusi signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Gorontalo, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang efektif sangat terkait dengan keberhasilan program-program pembangunan. Ketika RKA disusun dengan baik, alokasi dana dapat dilakukan secara tepat sasaran, memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Proses penyusunan yang melibatkan masukan dari berbagai pihak akan membantu dalam mengidentifikasi prioritas yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, hasil dari program-program yang didanai akan lebih dirasakan oleh masyarakat, menciptakan perubahan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Lebih dari itu, RKA yang transparan dan akuntabel juga berperan penting dalam meningkatkan legitimasi pemerintah daerah. Ketika masyarakat melihat bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif, kepercayaan mereka terhadap pemerintah akan meningkat. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, di mana masyarakat merasa dilibatkan dan diwakili dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penyusunan RKA yang baik bukan hanya sekadar soal angka, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pendampingan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), seperti yang dilakukan di Provinsi Gorontalo, memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman staf pemerintah daerah tentang proses penganggaran. Melalui kegiatan ini, staf diberikan kesempatan untuk belajar secara langsung mengenai teknik dan praktik terbaik dalam penyusunan anggaran. Pendampingan ini tidak hanya mencakup aspek teoritis, tetapi juga penerapan praktis, sehingga staf dapat melihat dan merasakan manfaat dari pendekatan yang dilakukan. Dengan bimbingan yang tepat, mereka diharapkan mampu mengidentifikasi masalah dalam proses penganggaran dan mencari solusi yang efektif.

Dengan adanya pendampingan, diharapkan para staf dapat lebih mudah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip penganggaran yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Peningkatan pemahaman ini akan membawa dampak positif pada kualitas RKA yang disusun, sehingga alokasi anggaran menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, staf yang terlatih akan lebih mampu berkomunikasi dengan masyarakat mengenai anggaran, yang pada gilirannya akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Dengan demikian, pendampingan ini bukan hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), diharapkan muncul rasa kepemilikan yang tinggi terhadap program-program pemerintah. Ketika masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, mereka merasa diakui dan dihargai, yang mendorong keterlibatan

lebih lanjut dalam implementasi program. Rasa kepemilikan ini penting, karena semakin masyarakat merasa memiliki program tersebut, semakin besar pula komitmen mereka untuk mendukung suksesnya kebijakan pemerintah.

Dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah akan meningkat sebagai hasil dari keterlibatan tersebut. Ketika masyarakat melihat bahwa suara mereka diperhitungkan dan kebutuhan mereka diakomodasi dalam RKA, kepercayaan mereka terhadap pemerintah juga akan tumbuh. Ini menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat, di mana kedua belah pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sinergi yang terbangun akan memperkuat efektivitas program-program pembangunan, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk inovasi, serta memastikan keberlanjutan dari setiap inisiatif yang diambil. Dengan demikian, upaya untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan RKA akan memberikan dampak yang luas dan positif bagi pembangunan daerah.

Keberhasilan kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang partisipatif dapat diimplementasikan secara lebih luas di berbagai wilayah. Model ini dapat menunjukkan bagaimana keterlibatan masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintah daerah dapat menghasilkan anggaran yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, daerah lain dapat mengambil pembelajaran dari pengalaman di Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan praktik pengelolaan anggaran mereka.

Di samping itu, diharapkan bahwa dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan anggaran daerah dapat ditingkatkan secara signifikan. Ketika anggaran disusun dengan lebih transparan dan akuntabel, masyarakat akan lebih percaya bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, tetapi juga akan memperkuat legitimasi pemerintah daerah. Dengan demikian, model yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian ini dapat menjadi langkah awal untuk membentuk budaya penganggaran yang lebih baik di seluruh Indonesia, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

## METODE

Kegiatan pendampingan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025 di Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dilaksanakan melalui beberapa tahap terstruktur untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan hasilnya. Metode pelaksanaan ini melibatkan pendekatan kolaboratif yang mengedepankan partisipasi aktif dari semua pihak terkait.

1. **Persiapan.** Tahap awal melibatkan persiapan yang mencakup identifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam penyusunan RKA. Tim pengabdian melakukan analisis situasi untuk memahami konteks dan tantangan yang ada. Selain itu, pertemuan awal dengan pihak-pihak terkait diadakan untuk menjelaskan tujuan dan manfaat dari kegiatan ini.
2. **Pelatihan dan Workshop.** Setelah persiapan, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan dan workshop. Dalam sesi ini, staf Sekretariat Daerah diberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip penyusunan RKA yang baik, teknik perencanaan anggaran, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Materi yang diberikan meliputi analisis kebutuhan, pengalokasian anggaran, dan penyusunan indikator kinerja.
3. **Pendampingan Teknis.** Tim pengabdian memberikan pendampingan teknis secara langsung selama proses penyusunan RKA. Pendampingan ini dilakukan dengan cara mendampingi staf dalam merumuskan program, mengidentifikasi sumber pendanaan, dan menyusun dokumen RKA. Sesi ini bertujuan untuk memastikan bahwa staf mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan.
4. **Partisipasi Masyarakat dan Akademisi.** Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, partisipasi masyarakat dan akademisi dilibatkan dalam proses penyusunan RKA. Pertemuan dengan masyarakat dan akademisi diadakan untuk menggali masukan dan aspirasi mereka terkait program-program yang diusulkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan Masyarakat dan akademisi, tetapi juga memastikan bahwa RKA yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

5. Pelaporan dan Rekomendasi. Di akhir kegiatan, tim pengabdian menyusun laporan yang merangkum seluruh proses, hasil, dan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Laporan ini disampaikan kepada Sekretariat Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RKA di tahun-tahun berikutnya.
6. Penyerahan Dokumen RKA. Sebagai bagian dari proses akhir, dokumen RKA 2025 yang telah disusun diserahkan kepada Sekretariat Daerah. Penyerahan ini diiringi dengan diskusi mengenai implementasi dan tindak lanjut dari RKA tersebut, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan keberlanjutan program.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025 di Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas dan pemahaman staf mengenai pengelolaan anggaran. Melalui serangkaian pelatihan dan workshop, para peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip penyusunan RKA yang efektif, tetapi juga keterampilan praktis yang diperlukan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks nyata.



Gambar 1. Pemaparan Materi Sesi Ke 1 dan sesi 2

Hasil yang diperoleh mencerminkan peningkatan kemampuan staf dalam merencanakan dan mengelola anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu temuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RKA. Pertemuan yang diadakan untuk menggali masukan dari masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi. Masyarakat merasa lebih terlibat dalam proses perencanaan, yang menciptakan rasa kepemilikan terhadap program-program yang akan dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Kurniawan, 2020), yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam penganggaran dapat meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi pemerintah.

Namun, tidak semua aspek berjalan tanpa tantangan. Beberapa staf masih mengalami kesulitan dalam memahami teknik-teknik tertentu, terutama dalam merumuskan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelatihan dan pendampingan sudah dilakukan, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa staf benar-benar mahir dalam semua aspek penyusunan RKA. Penelitian oleh (Sihombing, 2021) juga menunjukkan bahwa meskipun ada pelatihan, penerapan konsep-konsep baru sering kali terhambat oleh faktor-faktor seperti kurangnya dukungan sistematis dari atasan dan keterbatasan waktu.

Meskipun kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterlibatan, tantangan struktural dalam organisasi tetap ada. Misalnya, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang diusulkan dan implementasinya di lapangan. Hal ini mengingatkan kita pada studi oleh (Prabowo, H., & Sari, 2019), yang menunjukkan bahwa bahkan dengan adanya pelatihan, penerapan kebijakan sering kali tidak konsisten karena kurangnya sinergi antarunit dalam pemerintah daerah. Tantangan ini menjadi perhatian serius, karena tanpa adanya kolaborasi yang efektif antara berbagai unit kerja, kebijakan tidak akan dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, faktor budaya organisasi dan resistensi terhadap perubahan juga sering kali menghambat pelaksanaan kebijakan, sehingga memerlukan perhatian lebih dalam upaya perbaikan.

Di sisi lain, beberapa studi menunjukkan pentingnya dukungan manajemen puncak dalam mengatasi tantangan ini. Menurut (Agustina, 2020), keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada komitmen dan dukungan dari pimpinan daerah. Tanpa dukungan tersebut, upaya untuk menyelaraskan kebijakan dengan praktik di lapangan akan mengalami kesulitan. Begitu juga, penelitian oleh (Rahardjo, 2021) menyatakan bahwa keterlibatan stakeholder yang lebih luas, termasuk masyarakat dan sektor swasta, dapat membantu menciptakan ekosistem yang mendukung implementasi kebijakan dengan lebih baik. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih kuat, sehingga kebijakan yang telah disusun dapat dilaksanakan secara efektif dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat.

Selain itu, penting untuk mencermati bagaimana hasil kegiatan ini dapat diintegrasikan dengan kebijakan yang lebih luas. Pendampingan yang telah dilakukan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perlu dihubungkan dengan strategi jangka panjang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Jika pemerintah tidak memberikan dukungan yang cukup kepada staf dalam bentuk waktu, sumber daya, dan fasilitas yang memadai, pencapaian yang telah diraih melalui kegiatan ini mungkin tidak akan bertahan lama. Dalam konteks ini, dukungan yang berkelanjutan dari pimpinan daerah sangat krusial untuk memastikan bahwa staf dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh. Tanpa adanya dukungan tersebut, proses pembelajaran yang telah dilakukan akan terhambat, dan potensi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran akan hilang.

Oleh karena itu, rekomendasi untuk penguatan sistematis dalam pengelolaan anggaran menjadi sangat penting. Pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan yang tidak hanya mendorong partisipasi masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa staf memiliki akses yang cukup terhadap pelatihan dan sumber daya yang diperlukan. Selain itu, perlu ada mekanisme evaluasi yang jelas untuk menilai efektivitas implementasi RKA yang baru. Dengan demikian, penguatan sistematis ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan kolaborasi antarunit, sehingga hasil dari pendampingan dapat terintegrasi dengan baik dalam kerangka kebijakan yang lebih luas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa pengelolaan anggaran daerah tidak hanya menjadi lebih transparan dan akuntabel, tetapi juga mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Kegiatan ini juga membuka peluang untuk kolaborasi lebih lanjut antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan terus melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih kuat yang dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, hasil dari kegiatan pendampingan ini menunjukkan kemajuan yang berarti, tetapi juga menyoroti perlunya perhatian berkelanjutan terhadap tantangan yang ada agar pengelolaan anggaran di Provinsi Gorontalo dapat semakin efektif dan responsif.

## SIMPULAN

Kegiatan pendampingan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025 di Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo berhasil meningkatkan kapasitas staf dalam merencanakan dan mengelola anggaran secara lebih efektif. Melalui pelatihan dan pendampingan yang diberikan, staf tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang prinsip-prinsip penganggaran yang baik, tetapi juga keterampilan praktis yang diperlukan untuk menerapkannya. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RKA juga menjadi hasil positif, yang menunjukkan adanya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam program-program pemerintah.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam penerapan teknik penyusunan indikator kinerja dan konsistensi implementasi kebijakan. Kegiatan ini menyoroti pentingnya dukungan sistematis dari pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan hasil yang telah dicapai. Dengan demikian, meskipun telah ada kemajuan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi hambatan yang ada agar pengelolaan anggaran dapat lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan, beberapa saran dapat diajukan.

Pertama, perlu dilakukan pelatihan lanjutan untuk staf Sekretariat Daerah, terutama dalam aspek yang masih menjadi tantangan, seperti penyusunan indikator kinerja yang terukur. Pelatihan ini sebaiknya dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa staf tetap update dengan praktik terbaik dalam pengelolaan anggaran. Kedua, pemerintah daerah disarankan untuk menciptakan sistem

dukungan yang lebih kuat, termasuk alokasi waktu dan sumber daya yang memadai bagi staf untuk melakukan tugas mereka. Sinergi antarunit dalam pemerintah daerah harus ditingkatkan agar kebijakan yang diusulkan dapat diimplementasikan secara konsisten di lapangan. Ketiga, penting untuk terus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Forum-forum diskusi dapat diadakan secara rutin untuk menggali masukan dari masyarakat, sehingga RKA yang disusun benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Keempat, evaluasi berkala terhadap proses dan hasil penyusunan RKA sangat diperlukan. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan menyesuaikan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan anggaran di Provinsi Gorontalo, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025 di Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Terima kasih kepada tim pengabdian yang telah bekerja keras dan berdedikasi dalam memberikan pelatihan dan bimbingan kepada staf Sekretariat Daerah.

Kami juga mengapresiasi dukungan dari pihak pemerintah daerah, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada masyarakat yang telah aktif berpartisipasi dan memberikan masukan berharga selama proses penyusunan RKA.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, R. (2020). *Kepemimpinan dalam Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kurniawan, A. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 45–60.
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Prabowo, H., & Sari, A. (2019). *Konsistensi Kebijakan Publik di Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2021). *Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Kebijakan Publik*. Surabaya: Unair Press.
- Sihombing, R. (2021). Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Daerah. *Jurnal Keuangan Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 1–10.
- Taufiq. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang No. 17 tentang Keuangan Negara. (2023).